

## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ALTERNATIF DI INDONESIA

**Mulyono Bin Najamuddin**

Fakultas Agama Islam, UMSurabaya

### Abstrak

Pendidikan merupakan satu kunci yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik buruknya sumber daya manusia (*human resources*) tergantung dari pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan yang ada sekarang disadari masih belum dapat dinikmati oleh semua segmen masyarakat. Pendidikan alternatif dirasa mampu memberikan jawaban atas problema yang dihadapi dalam hal pendidikan. Pendidikan berbasis komunitas adalah suatu konsep pendidikan yang menjadikan komunitas (masyarakat setempat) sebagai pusat pembelajarannya. Pendidikan model ini adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan model ini memiliki prinsip-prinsip seperti *liberating* (pembebasan), keberpihakan, partisipatif, kurikulum yang digunakan adalah dengan berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat, adanya kerja sama antar masing-masing unsur komunitas, menggunakan evaluasi yang berpusat pada subyek didik yakni siswa, dan adanya penanaman rasa percaya diri (*self confidence*) pada siswa dengan konsentrasi pada pemupukan kemampuan siswa. Model pendidikan berbasis komunitas ini pada dasarnya adalah aktifitas pendidikan pendidikan yang mendasarkan proses pendidikannya pada kompleksitas realitas komunitas atau masyarakat setempat dan dengan semangat memajukan atau memberdayakan potensi masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Pengembangan Pendidikan Alternatif di Indonesia

### A Pendahuluan

Pendidikan merupakan satu kunci yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik buruknya sumber daya manusia (*human resources*) tergantung dari pendidikan yang diperolehnya. Jika pendidikan yang diperoleh seseorang memiliki kualitas yang baik, maka baik juga sumber daya manusia yang dimilikinya. Karena itu desain pendidikan selayaknya dipersiapkan secara matang sehingga hasil yang dicapai pun memuaskan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A. Syafi'i Ma'arif et. al., 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia: antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, hlm. 15.

Selain dari pada itu, kenyataan yang ada di masyarakat menyebutkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi. Kesemuanya mewabah karena mewabahnya kebodohan. Padahal dengan jelas disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau Indonesia (dalam hal ini pemerintah) bertekad besar membangun kecerdasan masyarakat maka hal itu sangat tergantung pada keberhasilan menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu dan merata.<sup>2</sup>

Prof. Dr. Djohar, MS. menyebutkan bahwa pendidikan yang ada sekarang adalah bentuk-bentuk pendidikan yang dibuat sedemikian rupa sehingga lembaga pendidikan adalah sekadar menarik minat masyarakat untuk dijadikan sebagai pilihannya, tanpa mengetahui isinya, dan perubahan apa yang terjadi di dalamnya. Dari kecenderungan yang seperti itu, tampaknya lembaga pendidikan manapun belum menunjukkan adanya perubahan sistem pendidikan yang berarti, kecuali sekadar memperoleh siswa yang memiliki kualitas IQ (*intellectual quotion*) yang relatif baik, tetapi tanpa pengembangan potensi lain dari siswa.<sup>3</sup> Kriteria semacam itu yang sekarang menjadi patokan kualitas lembaga pendidikan dan lebih dari itu, sebagai patokan kelulusan siswa.

Selain tersebut di atas, kekeliruan fatal dalam pendidikan kita bisa juga dilihat dari hal-hal yang dianggap kecil namun sesungguhnya berimplikasi besar bagi kesejahteraan warga negara khususnya warga miskin dan desa terpencil.<sup>4</sup> Pendidikan alternatif dirasa mampu memberikan jawaban atas problema yang dihadapi sebagian masyarakat dalam hal pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya bermunculan “lembaga” pendidikan alternatif di Indonesia.

## **B Hakikat Pendidikan**

Berbicara mengenai hakikat pendidikan tidak terlepas dari pengertian pendidikan itu sendiri yang berkembang menjadi disiplin ilmu pendidikan atau pedagogik yang dengan pendekatan tersebut berusaha mencari makna pendidikan, peranan pendidikan dan kemungkinan-kemungkinan pendidikan. Dari sudut pandang ini, pendidikan dilihat sebagai proses yang inheren dalam konsep manusia. Artinya manusia hanya dapat dimanusiakan melalui proses pendidikan berkenaan dengan obyek dari proses tersebut adalah peserta didik. Tingkah laku proses pendewasaan peserta didik merupakan obyek dari ilmu pendidikan yang melihat hakikat pendidikan sebagai pola struktur hubungan antara subyek dan obyek, yaitu antara pendidik dan peserta didik.

Terdapat beberapa pemikiran mengenai pendidikan. Paling tidak terdapat dua istilah yang sering digunakan, yaitu *paedagogie* dan *paedagogiek*. *Paedagogie* berarti “pendidikan” sedangkan *paedagoiek* adalah “ilmu pendidikan”. *Paedagogiek* atau ilmu pendidikan adalah yang menyelidiki, merenung tentang gejala-gejala perbuatan

---

<sup>2</sup> St. Sularto, 2007. Tentang Mimpi Besar Indonesia, dalam Forum Mangunwijaya. *Op. Cit.* Hlm: 99

<sup>3</sup> Djohar, Membedah Pendidikan Alternatif di Indonesia, Forum Mangunwijaya, *Ibid.* Hlm: 150

<sup>4</sup> Didapat dari <http://Qaryah.Pendidikansalatiga.Net/Profil.Htm>, diakses 12 Oktober 2007

mendidik. Istilah ini berasal dari *Paedagogeia* (Yunani) yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan yang sering menggunakan *paedagogos* adalah seorang pelayan pada zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan dan menjemput anak-anak ke dan dari sekolah. *Paedagogos* berasal dari kata *paedos* yang berarti anak, dan *agoge* berarti saya membimbing, memimpin. Kata *paedagogos* yang mulanya berarti pelayan, padaperkembangannya berubah menjadi kata yang memiliki arti mulia.<sup>5</sup>

Adapun dalam terminologi Arab istilah pendidikan identik dengan istilah *al-tarbiyah*. Dalam hal ini Al-Jauhari memberikan makna pada term *tarbiyah* dengan *robban* dan *robba*, dengan artian etimologi memberi makan, memelihara, dan mengasuh.<sup>6</sup> Dalam artian *istilahi* tarbiyah menurut Al-Ashfahani diartikan dengan proses menumbuhkan sesuatu secara bertahap yang dilakukan setahap demi tahap samapai pada batas kesempurnaan (*haddit tamam*).<sup>7</sup> Dalam bahasa lain, Al-Ustadz Muhammad Athiyah Al-Abrosyi mengartikan *tarbiyah* dengan upaya mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, kebahagiaan hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, kesempurnaan etika, sistematis dalam berfikir, tajam berperasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain, berkompeten dalam mengungkapkan bahasa tulis dan lisan, dan terampil berkreasi.<sup>8</sup>

### C Kondisi Pendidikan Nasional

Saat sekarang setelah 60 tahun lebih Indonesia bertekad<sup>9</sup> mencerdaskan kehidupan bangsa belum juga menunjukkan hasil keberhasilan yang memuaskan. Seiring perjalanan bangsa ini, sepanjang jalan itu pula pendidikan di Indonesia dijalankan. Lebih dari itu, seiring pergantian pemerintahan (dalam hal ini Menteri Pendidikan), “wajah” pendidikan di Indonesia-pun silih berganti.

Era reformasi yang awalnya diharapkan dapat membenahi era sebelumnya yang dipandang tidak berpihak pada pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, belum juga dapat memuaskan harapan awal tersebut. Lebih buruk dari itu, pendidikan yang sekarang dijalankan kadang terasa sangat memprihatinkan. Bahkan beberapa kasus muncul terasa lebih memalukan dan memilukan serta menyakitkan. Dengan tidak menafikan perkembangan-perkembangan pendidikan yang ada, kiranya data-data berikut dapat menggambarkan muramnya “wajah” pendidikan Nasional.

Laporan *Human Development Index* (HDI) yang didirikan *United Nations Development Programme* (UNDP)<sup>10</sup> menyebutkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia

---

<sup>5</sup>Djumransjah, H.M., *Pengantar Filsafat Pendidikan*. 2004. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm:21-22.

<sup>6</sup> Sebagaimana dikutip oleh Syaikh Muhammad Naquib al-Attas dalam *Konsep Pendidikan dalam Islam*. 1988. Bandung: Mizan. Cet. III. Hlm: 66

<sup>7</sup> Sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman An-Nahlawiy dalam *Ushulut tarbiyah Al-islam wa Asalibuha fil bayt, wal madrasah, wal Mujtama'*. 1979. Beirut: Dar el-Fikr. Hlm; 13.

<sup>8</sup> Sebagaimana dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Mujib dalam *Pemikiran Pendidikan Islam: kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasinya*. 1993. Bandung: Trigenda Karya. Hlm:131-132.

<sup>9</sup> Tekad tersebut dapat diambil dari semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 khususnya alinea keempat.

<sup>10</sup> Sebagaimana dikutip oleh Sujono Samba dalam *Lebih Baik Tidak Sekolah..* 2007. Yogyakarta: LKiS. Hlm: 6

berada pada peringkat 110 dari 177 negara, di bawah Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura yang sesama ASEAN (*Association of South East Asia Nations*). Filipina berada di urutan ke-84, Vietnam ke-108, Thailand ke-73, Malaysia urutan ke-61, Brunei urutan ke-33, dan Singapura urutan ke-25. Data HDI itu diukur dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks perekonomian. Data dari Departemen yang menangani pendidikan sendiri (Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2005)<sup>11</sup> menyebutkan bahwa angka putus sekolah mencapai 1.122.742 anak dan angka buta aksara mencapai 15.414.211 orang.

Sebagai bagian dari bangsa yang telah *baiat* untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan bangsa, tentu kita merasa teriris hatinya menyaksikan hasil pengukuran yang tersebut di atas. Informasi tersebut sudah barang tentu harus menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja dan upaya keras segenap bangsa dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Menurut Sulaeman yang terjadi justru sebaliknya yakni menambah rendahnya derajat dan martabat manusia. Eksistensi yang sebenarnya menjadi hak milik secara mutlak untuk *survive* dan mengendalikan hidup, ternyata hilang dan kabur bersama arus yang menerpanya. Makna pendidikan yang belum terealisasi ini menurutnya terkait dengan situasi sosio-historis dan kondisi lingkungan yang melingkupinya. Seperti halnya penjajahan yang dilakukan Barat (kaum kolonialisme) terhadap bangsa Indonesia selama berabad-abad ternyata membawa dampak yang sangat serius terhadap pola pikir dunia pendidikan, sehingga amat berpengaruh terhadap proses pendidikan yang berlangsung. Salah satu dampak yang paling buruk dari kolonialisme yang telah melanda negara jajahan adalah dengan munculnya sebuah masyarakat kelas “elit” yang lebih tepat disebut sebagai “anak-anak yang tertipu”. Produk dari sistem pendidikan (Barat) yang “mengagumkan” ini didesain untuk membentuk sebuah kelas yang tercerabut dari tradisi budaya dan moralnya.<sup>12</sup> Akibatnya adalah produk pendidikan yang tidak sadar lingkungan masyarakat, budaya, adat, dan lainnya.

Selain dari pada itu, kenyataan yang ada di masyarakat menyebutkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi. Kesemuanya mewabah karena mewabahnya kebodohan. Padahal dengan jelas disebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kalau Indonesia (dalam hal ini pemerintah) bertekad besar membangun kecerdasan masyarakat maka hal itu sangat tergantung pada keberhasilan menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu dan merata.<sup>13</sup>

Bahasan mengenai artian pendidikan alternatif ini dapat samapai pada kesimpulan bahwa pendidikan alternatif merujuk pada artian model pendidikan yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm: 7

<sup>12</sup> Sulaeman Ibrahim, 2000. *Pendidikan Sebagai Imperialisme dalam Merombak Pola Pikir Intelektualisme Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 81.

<sup>13</sup> St. Sularto, Tentang Mimpi Besar Indonesia, dalam Forum Mangunwijaya. *Op.cit.*. Hlm: 99

selalu berbeda atau selalu berusaha berbeda dengan mainstream umumnya dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari mulai bentuk organisasi dari lembaga pendidikan alternatif tersebut, materi pembelajaran yang diadakan, metode pembelajarannya, ataupun dari segi-segi lainnya.

#### **D Latar belakang Lahirnya Pendidikan Alternatif**

Perjalanan pendidikan di Indonesia yang sudah cukup panjang ternyata masih menghasilkan keadaan yang belum diinginkan. Urutan belakang kualitas pendidikan Indonesia sebagaimana tersebut di atas adalah buktinya. Terlebih mengingat kebijakan pemerintah yang terkadang tidak tepat dalam menangani pendidikan. Selain pemerintah, lembaga pendidikan-pun terkadang mengambil kebijakan yang kurang sepatutnya.<sup>14</sup> Hal inilah yang turut berkontribusi atas “muramnya” pendidikan nasional.

Sistem persekolahan yang ada selama ini baru dapat menghasilkan generasi yang lemah. Ciri-ciri orang lemah tersebut di antaranya rendah daya inisiatif dan kreatifitasnya, rendah rasa percaya diri, tidak berdaya dan pada gilirannya tidak mampu hidup mandiri. Orang lemah tersebut kemudian karena tuntutan hidup encari orang kuat untuk menopang hidupnya, orang kuat ini dapat berupa perusahaan ataupun pemerintah.<sup>15</sup> kalau sekolah hanya melahirkan orang-orang lemah yang selaluingin bergantung dan tidak sanggup mandiri, maka dengan logika sederhana, tidak mungkin ada orang, perusahaan, atau bahkan negara sekalipun yang mau dan mampu menampungnya.oleh karena itu fenomena menumpuknya pengangguran berpendidikan adalah konsekuensi yang memang seimbang.

Di sisi lain masyarakat (orang tua) mengeluh dengan mahalnya biaya sekolah yang semakin meninggi. Karena masyarakat menyadari bahwa sekolah itu penting dan menganggap sekolah sebagai satu-satunya tempat untuk membekali dan menyiapkan anak menghadapi masa depan yang lebih baik maka dengan segala daya dan upaya, apapun dan bagaimanapun dipertaruhkan agar bisa menyekolahkan anaknya dengan harapan setelah lulus, mendapat ijazah dengan nilai baik cukup sebagai modal untuk memperoleh pekerjaan (menjadi buruh, karyawan, pegawai) dengan mendapat bayaran yang besar. Akan tetapi yang terjadi sering adalah sebaliknya. Sebagian besar justeru merasa cemas setelah lulus sekolah. Yang mempunyai ijazah bingung bagaimana dan ke mana menawarkan ijazahnya. Orang tua pun bingung dan akhirnya cara apapun ditempuh untuk mendapatkan keinginannya untuk hidup baik.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> di antara kebijakan yang menurut hemat penulis kurang tepat adalah pelaksanaan Ujian Nasional yang dijadikan sebagai satu-satunya instrumen penentu kelulusan siswa, kebijakan pemotongan anggaran, kebijakan alokasi 20% pendidikan dari dana Anggaran pendapatan dan belanja Negara sudah termasuk alokasi gaji guru. Kebijakan lembaga pendidikan yang tidak semestinya hemat penulis adalah meninggikannya biaya belajar, baiak mulai tingkat dasar, menengah, samapai pada pendidikan tingkat tinggi.

<sup>15</sup> Sujono Samba, *op.cit.* Hlm: 21

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm: 22-23

Dunia persekolahan yang demikian dipastikan adalah karena adanya ketidakberesan yang mendasar dalam sistem persekolahan. Pendidikan sebagaimana tersebut di depan, pada hakikatnya adalah manifestasi kehidupan. Hidup adalah pendidikan itu sendiri dan pendidikan adalah hidup itu sendiri. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Eksistensi manusia yang sebenarnya adalah ia merdeka dari kekangan apapun. Kehidupan akan berkembang dengan optimal manakala ada pemerdekaan. Hal ini tidak bisa lepas dari pandangan bahwa fitrah manusia adalah bebas dan merdeka, dan menempatkan manusia sebagai pelaku atau subyek serta bukanlah sebagai penderita atau obyek. Demikian dengan pendidikan, ia akan kehilangan ruhnyanya manakala tidak ada pemerdekaan dalam prosesnya. Dapat dipastikan bahwa hanya dengan pendidikan berkualitas siswa dapat menjadi pribadi yang berkualitas. Ukuran kualitas tentu bukan karena siswa mempunyai nilai angka kuantitatif yang tinggi. Bagi Sujono Samba, indikasi manusia berkualitas adalah manakala seseorang sanggup memecahkan persoalan kehidupannya, kreatif, mandiri, beretika, dan terus semangat mengembangkan pengetahuannya sehingga merasa hidup sejahtera dan berguna bagi orang lain.

Sekolah yang pada dasarnya adalah sebagai pelaksana kegiatan pendidikan, seolah-olah berubah menjadi sebuah industri atau perusahaan jasa, ia bukan lagi sebagai lembaga yang mengupayakan pembangkitan dan pembangunan kesadaran kritis. Keadaan ini telah mendorong munculnya fenomena jual beli gelar, jual beli ijazah dan lainnya. Lembaga pendidikan kemudian alih fungsi menjadi lembaga bisnis. Praktek bisnis pendidikan ini secara bertahap akan menimbulkan diskriminasi terhadap tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Kondisi ini tentu kalau dibiarkan berlarut akan merusak semua sendi kehidupan bangsa.

Berkaitan dengan kondisi pendidikan yang ada Mochtar Buchori menyebutkan bahwa:

*“... Praktek pendidikan kita yang selama ini mengabaikan pendidikan nilai harus diubah sampai ke fondasinya. Kita harus mengusahakan lahirnya model pendidikan yang memupuk kemampuan berfikir dan bertindak kreatif. Model pendidikan yang baru harus memiliki liberating effect (efek pembebasan-pen) terhadap pertumbuhan generasi baru. Kita harus menghentikan pendidikan yang dampaknya ialah membelenggu generasi muda kepada segala bentuk kekolotan.”<sup>17</sup>*

Dengan demikian apabila sekolah yang diharapkan belum mampu menjalankan proses pendidikan sebenarnya atau bahkan membelenggu kreatifitas, menjauhkan dari realitas, mengerdikan idealisme, membingungkan, tentu harus dicarikan solusinya. Belajar sesungguhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun, dan dalam keadaan apa pun dengan keharusan berkemauan kuat untuk membangun kompetensi diri. Dari sinilah sebagian masyarakat mencoba dan

---

<sup>17</sup> Mochtar Buchori, Kreatifitas dan Otonomi Normatif. Dalam *KOMPAS*. Edisi Selasa 19 Februari 2008 pada Kolom OPINI.

membuktikan kemampuannya dalam menangani problem ini dengan membangun sekolah alternatif. Ia didesain sebagai solusi atas buramnya pendidikan yang ada.

Atho Mudzar<sup>18</sup> menyebutkan bahwa sejumlah konsekuensi bagi sistem pendidikan nasional manakala menghendaki masyarakat Indonesia Baru terwujud maka pendidikan harus mampu melahirkan manusia yang demokratis dan bertanggung jawab, kuat dan berkarakter, siap hidup di tengah masyarakat yang plural, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan inovatif, pengembang IPTEK, unggul diberbagai bidang di era global. Mengingat belum mampunya sistem pendidikan dalam menghasilkan *out put* sebagaimana diharap maka lahirlah pendidikan alternatif.

Istilah alternatif merujuk pada artian suatu pilihan, cadangan, dan juga kemungkinan<sup>19</sup>. Sehingga dapat pula diartikan dengan suatu kemungkinan yang dapat dijadikan sebuah pilihan atas suatu persoalan. Kalau istilah ini terlebih dahulu diawali dengan “pendidikan”, maka mempunyai artian pendidikan yang dapat dijadikan pilihan dalam menempuh proses pendidikan. Hal ini dikarenakan keberadaan pendidikan yang sudah umum dikenal belum dapat memberikan kebaikan nyata kepada masyarakat. Istilah pendidikan alternatif merupakan istilah generik dari berbagai program pendidikan yang dilakukan dengan cara berbeda dari cara biasanya. Ia menjadi solusi alternatif pilihan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Reimer Everest dalam *School is Dead-an Eassy on Alternatives in Edeucation*<sup>20</sup> menyebutkan bahwa alasan utama mengapa dibutuhkan sekolah alternatif atau alternatif-alternatif bagi sekolah adalah karena sekolah yang ada selama ini meniadakan jalan keluar bagi manusia dari monopoli yang berlangsung dalam dunia pendidikan selama ini.

## **E Pendidikan Alternatif Berbasis Komunitas**

### **1. Pengertian Komunitas**

Komunitas yang dalam bahasa Inggris dibahasakan dengan *community*, sebagaimana tersebut dalam ”The Advanced Learner’s Dictionary of Current English” adalah bahwa *community is the people living in one place, district or country, considered as a whole*” yang dapat dikatakan sebagai sekelompok orang yang hidup dalam suatu tempat tertentu, daerah atau kota dengan dipandang secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai komunitas yang kemudian akan dijadikan basis pendidikan maka berikut akan disajikan uraian tuntas mengenai komunitas. Secara singkat komunitas adalah suatu daerah kehidupan masyarakat (*area of social living*) yang ditandai oleh beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Oleh Williern Ogburn dan Mayer F. Nimkoff<sup>22</sup> komunitas

---

<sup>18</sup> Sebagaimana disebut oleh Anik Ghufro, *op. cit.* hlm: 145

<sup>19</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. Tt. Surabaya: Arloka. Hlm:23

<sup>20</sup> Sebagaimana dikutip oleh Ahmad M. Nizar Alfian Hasan dalam *Desaku Sekolahku: komunitas belajar Qaryah Thayyibah Kalibening Salatiga*. 2007. Salatiga: Pustaka Q-Tha. Hlm: 7.

<sup>21</sup> Muhammad Cholil Mansur, *Sosiologi Masyarakat Kota Dan Desa*. Tt. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm:68

<sup>22</sup> Williern Ogburn dan Mayer F. Nimkoff, *Sociology*. Boston: Houghton Mifflin Company. 1964. Fourth Edition. Hlm: 291

diartikan dengan keseluruhan masyarakat yang hidup disuatu tempat. Mereka menyebutkan bahwa *a community is the total organized social life of a locality*.

Menurut Soeryono Soekanto<sup>23</sup> istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai “masyarakat setempat”, istilah yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Apabila anggota-anggota sesuatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup anggota utama, maka kelompok tersebut disebut masyarakat setempat. Sebagai suatu perumpamaan, kebutuhan seseorang tidak mungkin secara keseluruhan terpenuhi apabila dia hidup bersama-sama rekan lainnya yang sesuku. Dengan demikian kriteria yang utama bagi adanya suatu masyarakat setempat adalah adanya social relationships antara anggota suatu kelompok.

Masyarakat setempat adalah bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu di mana factor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar di antara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.<sup>24</sup> Dapat disimpulkan secara singkat bahwa masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar daripada masyarakat setempat adalah lokalitas dan seperasaan masyarakat setempat tersebut.

Hassan Shadily<sup>25</sup> mengemukakan bahwa *community* adakalanya di-Indonesikan dengan *paguyuban*. Kalau *society* diartikan dengan masyarakat secara umum, *community* menunjukkan arti masyarakat yang terbatas, umpamanya masyarakat Jakarta, masyarakat Islam (di Jakarta atau di seluruh dunia). Menurutny, *community* selain memperlihatkan rasa sentiment yang sama, juga menunjukkan lokalitas, suatu pembatasan letak kediamannya, karena itu juga disebut *masyarakat setempat*, *masyarakat di sini*. Dalam komunitas ini orang umumnya mendapatkan kemutlakan kebutuhan hidupnya, berbeda umpamanya dengan suatu kumpulan ekonomi maupun politik, dimana anggota-anggotanya hanya mencari suatu kepuasan yang tertentu saja, yaitu ekonomi atau politik saja.

## **2. Pendidikan Berbasis Komunitas (Community Based Education)**

Pada dasarnya pemberdayaan<sup>26</sup> komunitas (masyarakat setempat/sekitar) adalah titik tekan gerakan pendidikan ini. Dalam pandangan pendidikan ini peserta didik dan lingkungannya adalah dua hal yang saling membutuhkan dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Sudah barang tentu bahwa seorang anak didik ke depan

---

<sup>23</sup> Soeryono Soekanto, *Sosiologi: suatu penantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm: 149

<sup>24</sup> Selo Soemardjan dalam *Social Changes in Yogyakarta*. Sebagaimana disebut oleh Soeryono Soekanto. *Ibid*.

<sup>25</sup> Hassan Shadlily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. 1993. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. Ke-dua belas. Hlm: 60

<sup>26</sup> Istilah pemberdayaan penulis adaptasi dari istilah yang dipakai Ahmad Bahruddin, pengelola pendidikan alternatif berbasis komunitas di Kalibening Salatiga. Istilah ini merujuk pada artian terwujudnya masyarakat (setempat) yang berdaya, yang mampu, yang kuat untuk menentukan nasibnya sendiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dengan tidak *depend on* pihak lain/luar. Walaupun tetap tidak mengingkari kodratnya untuk bersosialisasi dengan masyarakat global.



akan hidup di lingkungannya maka dia harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Peserta didik pada konteks pendidikan berbasis komunitas didorong untuk belajar bagaimana memperbaiki lingkungan dengan agenda-agenda penguatan daya dukung sumber daya agar kehidupan peserta didik kelak dapat lebih baik.

Ketika anak berkepentingan meningkatkan kapasitas diri maka lingkungan sekitar telah menyiapkan diri sebagai *resource* pembelajaran demikian juga sebaliknya ketika komunitas atau desa membutuhkan sentuhan-sentuhan pemberdayaan maka anak-anak sekarang inilah yang menjadi pertaruhan desa tersebut di masa mendatang untuk menyelenggarakan perbaikan-perbaikan. Misalnya ketika anak didik mencoba menyelenggarakan budidaya belut maka yang penting dicoba adalah bagaimana dengan budidaya belut itu kebutuhan nutrisi serta gizi komunitas dapat terpenuhi dengan baik, dan bukan kebutuhan pasar. Sehingga lambat laun cara pandang komoditas berganti dengan cara pandang ekonomi subsistem.<sup>27</sup>

Pendidikan dengan komunitas sebagai basisnya dengan demikian dapat diandalkan untuk dijadikan solusi atas pendidikan yang ada, terlebih masyarakat Indonesia yang sangat masyhur dengan hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Bagi penulis, kekuatan kekerabatan (*the power of brotherhood*) yang sudah mengakar di masyarakat ini adalah daya atau kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mengembangkan pendidikan model ini.

Terdapat arti atas pendidikan berbasis masyarakat bahwa ia adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.<sup>28</sup> Sedangkan *stressing* kajian dalam tulisan ini adalah pendidikan berbasis komunitas.

a. Prinsip-prinsip dalam pendidikan berbasis komunitas

Menurut Bahrudin<sup>29</sup> pendidikan berbasis komunitas paling tidak memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi. Prinsip dasar inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai semangat sekaligus ruh jalannya pendidikan tersebut. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pembebasan (*liberating*)

Pendidikan berbasis komunitas harus benar-benar menekankan paham *liberating* sekaligus *change* ke arah yang lebih baik dalam pembelajarannya. Membebaskan berarti keluar dari belenggu-belenggu yang selama ini mengekang. Belenggu-belenggu inilah yang menyebabkan tidak adanya daya kritis dan kreatifitas yang ragam. Sedangkan semangat perubahan lebih difahami dengan kesatuan proses

---

<sup>27</sup> Berkenaan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pendidikan berbasis komunitas ini penulis adaptasi dari Bahrudin, *Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah*. 2007. Yogyakarta: LKiS. Hlm: xii

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Beserta Penjelasannya, (Surabaya: Media Centre, 2005). hlm. 6

<sup>29</sup> Ahmad Bhrudin, *Op.Cit.* hlm: xiv-xv

belajar. Belenggu-belenggu yang dimaksud dapat berupa belenggu legalitas yang sangat formalistik serta prosedur yang sangat jauh dari efisien maupun efektif.

*Berkenaan dengan unsur liberating yang harus ada dalam pendidikan, Muctar Buchori menyebutkan bahwa:*

“...*Kita* harus mengusahakan lahirnya model pendidikan yang memupuk kemampuan berfikir dan bertindak kreatif. Model pendidikan yang baru harus memiliki *liberating effect* (efek pembebasan-pen) terhadap pertumbuhan generasi baru. Kita harus menghentikan pendidikan yang dampaknya ialah membelenggu generasi muda kepada segala bentuk kekolotan.”<sup>30</sup>

Semangat pembebasan yang ada dalam pendidikan berbasis komunitas ini tentu adalah juga sesuai dengan apa yang diharapkan Buchori. Buchori menghendaki pendidikan yang memiliki *liberating effect* adalah berkaitan dengan dinamika masyarakat yang semakin tidak jelas berkaitan dengan kekuatan normatif dan kekuasaan kreatifitas seseorang.

## 2) keberpihakan

Keberpihakan adalah terminologi yang dijadikan sebagai ideologi pendidikan itu sendiri.<sup>31</sup> Hal ini dikarenakan pendidikan dan pengetahuan pada hakikatnya adalah hak bagi seluruh rakyat. Lebih jauh mengenai keberpihakan ini adalah mengingat keberadaan pendidikan yang diselenggarakan selama ini mayoritas hanya menerima peserta didik yang berkemampuan ekonomi tinggi maka dalam perspektif pendidikan berbasis komunitas paradigma itu diubah dengan keyakinan bahwa pendidikan yang dijalankan harus berfihak pada masyarakat secara keseluruhan dengan menegaskan status latar sosio-kultur yang ada.

Pandangan keberpihakan ini tentu sesuai dengan prinsip *education for all*. Konsep pendidikan bagi semua tentu memprasyaratkan pendidikan yang dijalankan harus dapat menerima dengan tanggungjawab penuh untuk memberdayakan semua masyarakat dari semua lapisannya yang ada.

## 3) Partisipatif

Pendidikan yang menjadikan komunitas ataupun masyarakat sekitar sebagai basisnya sudah barang tentu memprasyaratkan partisipasi dari semua elemen yang ada dalam komunitas tersebut. Dalam ranah selanjutnya dapat disebutkan bahwa pendidikan model ini mengutamakan prinsip partisipatif antara pengelola, murid, keluarga, serta masyarakat dalam merancang bangun sistem pendidikan yang akan diterapkan. Hal ini dimaksudkan karena dari mereka semualah kebutuhan-kebutuhan bermunculan dan dengan pendidikanlah kebutuhan-kebutuhan ini dapat terpenuhi.

---

<sup>30</sup> Mochtar Buchori, Kreatifitas dan Otonomi Normatif. Dalam *KOMPAS*. Edisi Selasa 19 Februari 2008 pada Kolom OPINI.

<sup>31</sup> Sebagaimana diutarakan oleh Ahmad Bahrudin, *Op. Cit.* hlm: xiv-xv

Pandangan ini akan membuang jauh citra sekolah yang dingin dan tidak berjiwa yang selalu dirancang dan dibangun oleh intelektual luar komunitas yang tidak "membumi" karena tidak memahami apa yang dibutuhkan dan dicita-citakan masyarakat atau komunitas. Dalam pandangan penulis, hingga sekarang keterlibatan atau partisipasi masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pendidikan masih kurang. Banyak lembaga pendidikan yang berada di suatu tempat yang tidak mengenal kondisi sosio-kultur masyarakat di tempat tersebut. Hemat penulis, hal ini dikarenakan pada awal pengadaan lembaga pendidikan tersebut bukan berangkat dari inisiatif masyarakat setempat akan tetapi dari instruksi pemerintah yang sifatnya *to down*. Berbeda dengan keadaan lembaga pendidikan yang diinisiatif oleh pemerintah, lembaga pendidikan swasta memiliki dan mendapatkan partisipasi masyarakat lebih besar. Hal ini sangat dimungkinkan karena lembaga swasta memang berawal dari inisiatif, kehendak dan kemampuan warga setempat sehingga mereka dengan semangat memberikan partisipasinya yang sangat tinggi.

Prof. Dr. Imam Barnadib<sup>32</sup> mengemukakan bahwa terminologi pendidikan partisipatif merujuk pada artian pendidikan yang dalam prosesnya melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, guru, murid, orang tua murid, masyarakat dan lain-lain. Semua terlibat aktif dalam proses pendidikan untuk mencapai satu titik yang sama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan Muis<sup>33</sup> mengemukakan bahwa pendidikan partisipatif dapat diartikan dengan lebih mikro yakni pendidikan yang melibatkan semua komponen pendidikan dengan terkhususkan kepada peserta didik. Model pendidikan seperti ini bertumpu pada nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan kemerdekaan manusia.

#### 4) Kurikulum berbasis kebutuhan

Disebutkan dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pada pasal 1 bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>34</sup>

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Maka sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kurikulum yang dipakai dalam paradigma pendidikan berbasis komunitas haruslah bahwa ia benar-benar dimaksudkan untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan yang ada di komunitas tersebut, utamanya terkait dengan sumberdaya lokal yang tersedia.

Semua lembaga penyelenggara pendidikan pasti mempersiapkan produk didiknya (lulusannya) untuk terjun ke masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum sekolah

---

<sup>32</sup> Imam Barnadib dalam *Pengantar* buku Pendidikan Partisipatif : menimbang konsep fitrah dan progresivisme John Dewey. 2004. ditulis oleh Muis Sad Iman. Yogyakarta: Safiria Insania Press. Hlm: xii.

<sup>33</sup> Muis Sad Iman, *Pendidikan Partisipatif: menimbang konsep fitrah dan progresivisme John Dewey*. 2004. Yogyakarta: Safiria Insania Press. Hlm: 4

<sup>34</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Beserta Penjelasannya*, (Surabaya: Media Centre, 2005), hlm. 6

haruslah mengetahui atau mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat atau para pemakai produk sekolah (*stake holders*). Dalam pandangan pendidikan model ini belajar adalah bagaimana menjawab kebutuhan dalam pengelolaan sekaligus penguatan daya dukung sumber daya yang tersedia untuk menjaga kelestarian serta meningkatkan kualitas hidup.

#### 5) Kerjasama

Kerjasama merupakan satu istilah yang apabila dilaksanakan dengan sebaik mungkin seseorang ataupun masyarakat akan dengan mudah dapat mewujudkan cita-citanya. Demikian juga dalam lingkup pendidikan ataupun proses pendidikan. Metodologi pembelajaran yang dibangun dalam pandangan pendidikan berbasis komunitas harus selalu berdasarkan kerjasama dalam kegiatan pembelajarannya<sup>35</sup>. Dengan paham seperti ini maka dikotomi guru dan murid tidak diperlukan lagi karena semuanya adalah *murid* (orang yang berkemauan belajar).

Hemat penulis diakui atau tidak *term* "guru" dan "murid" mencirikan kepada sosok orang yang berbeda. "Guru" mencirikan kepada orang yang lebih besar paling tidak kualitasnya. "Murid" dengan sendirinya memiliki artian orang yang lebih kecil kualitasnya jika dibandingkan dengan "guru". Dalam ranah Islam Nabi Muhammad saw. adalah sosok manusia yang paling mulia<sup>36</sup>. Ia menjadi penunjuk jalan *haq* bagi dunia seisinya. Akan tetapi bagaimana pun hebatnya Muhammad beliau tidak menanamkan dirinya sebagai seorang "guru", lebih dari itu kita tidak pernah mendengar sebutan "murid" ataupun "peserta didik" bagi orang yang belajar pada Muhammad. Karena yang dikenal adalah sebutan *sahabat*, satu *term* yang penulis yakini penuh dengan kedekatan, penghormatan dan pemuliaan.

Semua yang terlibat dalam proses pendidikan (yang berbasis komunitas) adalah tim yang berproses secara partisipatif, semuanya memiliki peranan dan semuanya memiliki kontribusi. Kerjasama antar individu berkembang ke antar kelompok, antar daerah, antar negara, dan antar semuanya.

#### 6) Sistem evaluasi berpusat pada subyek didik

Puncak keberhasilan pembelajaran dalam pendidikan dengan komunitas sebagai basisnya adalah ketika si subyek didik (dalam *term* populer disebut peserta didik atau bahkan murid/siswa) menemukan dirinya, berkemampuan mengevaluasi diri sehingga tahu persis potensi yang dimilikinya berikut mengembangkannya sehingga bermanfaat bagi sesama terlebih komunitas di mana dia hidup.<sup>37</sup>

Evaluasi yang sebagaimana tersebut tentu memprasyaratkan kesadaran penuh dari subyek didik tersebut. Pandangan ini disemangati keyakinan bahwa semua manusia pada dasarnya dan keinginannya adalah memiliki kesadaran penuh terhadap

---

<sup>35</sup> Ahmad bahrudin. *Op. Cit.* hlm: xiv-xv

<sup>36</sup> Sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Qolam ayat 4 yang berbunyi: *wa innka la'ala khuluqin 'adzim*. sesungguhnya kamu (Muhammad) adalah benar-benar berada pada akhlak yang luhur.

<sup>37</sup> Ahmad Bahrudin, *Op. Cit.* hlm: xv

diri sendiri. Untuk mensukseskan evaluasi model ini menurut penulis menuntut kepercayaan penuh dari semua unsur masyarakat.

#### 7) Percaya diri

Pengakuan atas keberhasilan pembelajaran bergantung pada subyek pembelajaran itu sendiri. Pengakuan dalam bentuk apapun (termasuk ijazah, sertifikat, piagam, dan lainnya) tidak perlu dicari. Pengakuan akan datang dengan sendirinya manakala kapasitas pribadi dari si subyek didik meningkat, dan bermanfaat bagi yang lain.

Prinsip percaya diri ini memprasyaratkan setiap subyek didik untuk memegang paradigma pendidikan yang dipeluknya. Pendidikan dalam padangan ini adalah proses pemanusiaan manusia sekaligus berkesadaran lingkungan hidupnya. Proses pemanusiaan manusia sangat tidak berhubungan dengan lembaran-lembaran piagam ataupun ijazah.

#### b. Komponen pendidikan dalam konteks pendidikan berbasis komunitas

Beberapa komponen pendidikan yang diuraikan dalam di sini meliputi kurikulum, siswa, guru, dan sistim pembelajaran yang meliputi metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Secara berurutan, hal-hal tersebut akan diuraikan berikut ini.

#### 1) Kurikulum

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pada pasal 1 disebutkan bahwa Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>38</sup>

J. Galen Saylor dan William M. Alexander<sup>39</sup> mendefinisikan kurikulum sebagai berikut:

*The curriculum is the sum total of school's effort to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school.* Jadi segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak itu belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah termasuk kurikulum.

Kurikulum dalam pendidikan yang berbasiskan komunitas menjadikan kurikulum nasional sebagai salah satu referensi atau rujukan dalam mendesain silabi pembelajaran.<sup>40</sup> Di sini pembelajaran akan efektif, efisien, kontekstual dan riil ketika muatan materi bahasan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa, bukan keinginan guru atau keinginan siapa pun maka ketika mendesain silabi, terlebih pada

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS Beserta Penjelasannya, (Surabaya: Media Centre, 2005), hlm. 6

<sup>39</sup> S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, 1988, Bandung: Jemmars, hlm. 10

<sup>40</sup> Sujono Samba, *Op. Cit.* hlm: 43

aspek yang ingin dicapai haruslah melibatkan siswa dan masyarakat, tentu dengan semangat pengembangan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Ahmad Musa<sup>41</sup> sifat dasar yang melatarbelakangi kurikulum nasional adalah sebagai berikut:

- a) Menekankan pada pembelajaran politik
- b) Berpusat pada pengondisian budaya
- c) Menekankan pada keterampilan-keterampilan dasar dan latihan watak
- d) Mata pelajaran ditentukan terlebih dahulu
- e) Menekankan akademik dengan melebihi yang praktis dan intelektual.

Pandangan sebagaimana tersebut di atas kemudian dikritisi dan diberikan masukan oleh Ahmad Musa<sup>42</sup> sehingga dapat menekankan pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Menekankan pada pilihan persoalan yang bebas.
- b) Berpusat pada kegiatan belajar yang ditentukan bersama-sama.
- c) Menekankan izin bagi setiap individu untuk menentukan pusat perhatian sendiri dalam belajar.
- d) Kegiatan belajar ditentukan bersama-sama.
- e) Setiap siswa bebas menentukan sifat maupun isi dari apa yang dipelajarinya.

Semua hal di atas adalah upaya untuk memberikan tekanan dalam membangun basis pendidikan yang berorientasi pada komunitas. Dengan demikian kepentingan pengetahuan harus dikembalikan pada realitas aslinya. Pengetahuan adalah abstraksi dari realitasnya sehingga yang paling tepat dipelajari adalah belajar dalam realitas itu sendiri karena dengan begitu pengetahuan mempunyai makna yang sebenarnya.

## 2) Siswa

Paradigma<sup>43</sup> pendidikan berbasis komunitas menempatkan siswa benar-benar sebagai subyek pembelajaran. Siswa adalah orang yang paling berkepentingan untuk belajar. Siapa pun termasuk guru tidak diperbolehkan membuat aturan yang membatasi keinginan siswa untuk belajar.

Terdapat beberapa prinsip yang berhubungan dengan siswa. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ahmad Musa, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah; pembelajaran berbasis komunitas. Dalam *Pengantar* buku Pendidikan Alternatif Qaryah Thayyibah oleh Ahmad Bahrudin. *Op. Cit.* hlm: 8-9

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Paradigma adalah kerangka berfikir, model dalam teori ilmu pengetahuan (Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. 1996. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm: 779-780). Pada dasarnya paradigma berasal dari Bahasa Yunani yakni *paradeigma*. Terdiri dari *para* (di samping, di sebelah) dan *deiknai* (memperlihatkan; yang berarti model, contoh, ideal). Istilah ini semakin penting karena karya ilmuwan Amerika Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* tahun 1962. Menurut Kuhn setiap ilmuwan selalu bekerja dengan paradigma tertentu. Paradigma itu memungkinkan ilmuwan untuk memecahkan kesulitan yang muncul dalam rangka ilmunya. Dari artian tersebut, lahir beberapa pengertian di antaranya; cara memandang sesuatu, dalam ilmu pengetahuan; model, pola, ideal, dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem riset. Kuhn beranggapan bahwa teori-teori ilmiah dibangun sekitar paradigma dasar.

- a) Dituntut pemahaman (*tafhim*) dan bukan hafalan (*tahfidz*). Memahami sama sekali berbeda dengan mengambil pengetahuan secara "mentah-mentah".
- b) Dilibatkan dalam penyusunan silabi dan target pembelajaran. Silabi dan materi pembelajaran harus kontekstual dan harus sesuai dengan kebutuhan siswa, dengan pemanfaatan lingkungan sebagai media belajar aktif dan sebagai laboratorium ilmu pengetahuan yang tidak terbatas.
- c) Didorong untuk membangun semangat tanggung jawab dan kebersamaan di antara siswa. Tata tertib belajar, pengorganisasian kelas atau kelompok, dan sanksi bagi pelanggaran semua diserahkan pada siswa.
- d) Siapa yang lebih tahu mengajari yang belum tahu dan antar siswa saling mengevaluasi. Karena itu tidak akan ada ranking kepandaian atau prestasi di antara siswa karena ketika kebersamaan ini terbangun tidak ada siswa yang paling baik di antara yang lain.
- e) Kecerdasan siswa tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi sejauh mana tingkat emosional, kepekaan sosial, dan kecerdasan religiusnya.
- f) Siswa harus selalu gembira, terbebas dari tekanan dan beban yang tidak fungsional. Suasana menyenangkan dan membebaskan akan melahirkan daya inovasi, inisiatif, dan kreativitas dengan maksimal.<sup>44</sup>

Paparan di atas menggambarkan bahwa siswa harus benar-benar sebagai subyek yang paling berkepentingan untuk belajar. Sehingga siswa harus diberi ruang dan waktu seluas-luasnya agar dapat leluasa dalam berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, dan mengenali potensinya.

Bagi tokoh besar seperti Paulo Freire<sup>45</sup> murid dan guru adalah makhluk yang belum sempurna dan keduanya harus belajar satu sama lain dalam proses pendidikan. Proses ini bukan berarti bahwa guru menolak perannya sebagai figur yang melaksanakan proses belajar. Namun proses tersebut harus didasarkan pada dialog kritis dan penciptaan pengetahuan bersama.

### 3) Guru

Peran guru dalam proses pembelajaran sangat strategis. Demikian mulianya siswa dan masyarakat menempatkan posisi guru. Dikarenakan guru menempati posisi strategis maka guru pun memiliki kriteria yang harus dipenuhi. Tentu kriteria ini (dalam pendidikan berbasis komunitas) bukanlah persyaratan legal formal seperti ijazah, melainkan pada seseorang yang mempunyai semangat tinggi untuk terus belajar.

Syarat-syarat sebagai mana yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

- a) Memiliki idealisme dan komitmen tinggi untuk selalu berpihak pada kemiskinan dan lingkungan.
- b) Memahami metodologi pembelajaran, mencintai profesi, dan memiliki kerangka berfikir yang terbuka dan luas.

<sup>44</sup> Sujono Samba, *Op. Cit.* hlm: 38

<sup>45</sup> Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Terjemahan oleh Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiartanto, 2002. Yogyakarta: REaD bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Cet. III. Hlm: 236

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm: 37

- c) Menguasai materi yang diajarkan, namun tetap menmatkan siswa sebagai tim yang secara bersama-sama berproses dalam belajar.
- d) Memahami analisis sosial sehingga kebutuhan siswa dan masyarakat di lingkungannya terpenuhi.
- e) Memosisikan diri ketika mengajar juga belajar sehingga secara terus menerus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Persyaratan-persyaratan guru yang tersebut di atas mendeskripsikan bahwa guru adalah fasilitator dan pelayan agar potensi dan kreatifitas siswa berkembang secara optimal. Guru memosisikan dirinya sebagai teman pendamping dan bagian dari siswa dalam kegiatan belajar siswa. Sehingga tugas guru adalah mengapresiasi kerja dan karya siswa bukan mengetes dan menilai karya siswa yang justeru terkadang memojokkan siswa. Hal yang mendasar untuk dikembangkan adalah mengembalikan pembelajaran pada pemilik aslinya yakni para siswa.

Bagi Freire<sup>47</sup> peran yang harus diemban oleh guru adalah mamaparkan masalah tentang situasi eksistensial yang telah dikodifikasi untuk membantu siswa agar memiliki pandangan yang lebih kritis terhadap realitas. Secara filodofis, bagi Freire, tanggung jawab guru yang menempatkan diri sebagai teman dialog adalah siswa lebih besar dari pada guru yang hanya memindahkan informasi yang harus diingat bahkan dihafalkan siswa. Tipe guru seperti ini merupakan subyek pengetahuan yang dihadapkan secara langsung dengan subyek pengetahuan yang lain, yakni siswa.

#### 4) Metode pembelajaran

Pembelajaran aktif merupakan metode pembelajaran yang memosisikan siswa sebagai subyek didik. Sistim ini bermuara pada filsafat konstruktivisme sebagai landasan berfikir aktif di mana pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, tidak serta merta menghadapkan siswa pada masalah dan pada tahapan selanjutnya siswa diajarkan secara aktif untuk memecahkan setiap masalahnya sendiri sehingga peran guru adalah sebagai pemberi fasilitas kebutuhan siswa yang apabila dilakukan sendiri oleh siswa justeru akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Yang menghubungkan pendidikan dengan kehidupan manusia adalah pendidikan kontekstual. Pembelajaran kontekstual dapat difahami dengan proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa memahami isi dari materi akademik yang mereka pelajari dengan cara mengaitkan mata pelajaran akademik dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka.<sup>48</sup>

Pembelajaran kontekstual merupakan paham belajar yang memandang pentingnya hubungan posisitf antara materi pelajaran dengan dunia nyata, konsep ini juga memandang pentingnya dorongan dan keterlibatan siswa untuk mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan aplikasinya dalam relitas hidup keseharian. Dalam konteks ini pembelajran dapat terjadi adanya situasi dimana

---

<sup>47</sup> Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Terjemahan oleh Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiartanto, 2002. Yogyakarta: REaD bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Cet. III. Hlm: 103

<sup>48</sup> Ahmad Musa, *op. cit.* hlm: 6-7



pendidikan lebih bersifat untuk siapa saja dan berlaku berdasarkan situasi lingkungannya.

Masyarakat dalam konteks pendidikan berbasis komunitas tidak dianggap sebagai kesatuan yang bersifat pasif, tetapi masyarakat adalah komunitas yang bersifat *organic* yang mampu bergerak dan menampilkan perwujudan kebudayaan dan peradaban secara aktif melalui transformasi budaya dan media dalam masyarakat kontemporer. Oleh karena itu pendidikan yang berbasiskan komunitas tidak menjadikan masyarakat sebagai bagian yang pasif namun secara keseluruhan merupakan basis pembelajaran yang bergerak menuju transformasi yang mampu diraihinya.

Menurut Ahmad Musa<sup>49</sup> terdapat pemahaman bahwa pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, simbol, kaidah, yang harus dimengerti dan dihafalkan, melainkan dikonstruksi dan dibangun oleh siswa dalam proses yang partisipatif sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran mampu sejajar dengan pertumbuhan dan pengalaman siswa, dan pengertian serta pemahaman yang komprehensif tersebut diharapkan mampu berkembang seiring dengan pengalaman baru.

Sedangkan beberapa aspek metodis yang diperlukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman pengetahuan adalah sebagai berikut<sup>50</sup>:

a) *Problematic*

Dalam hal ini kegiatan pembelajaran harus memiliki persoalan yang harus dibahas atau dipecahkan oleh siswa. Artinya pada permulaan setiap pembelajaran diawali dengan penyajian problem (*problem showing*) yang dilakukan guru selaku penyedia fasilitas. Dengan adanya problem semua yang dihadapi merupakan tantangan yang harus diatasi oleh siswa supaya aktif dalam setiap pembelajaran.

b) *Discovery dan inquiry*

Kemudian daripada itu siswa didorong untuk dapat mengkaji dan menemukan hal-hal baru, artinya ada kewajiban guru selaku penyedia fasilitas untuk mendorong siswa secara kreatif agar siswa termotivasi untuk melakukan penjelajahan dan penemuan atas problem yang dihadapi dengan menyediakan akses atas buku dan atau media lainnya seperti internet.

Langkah penyediaan fasilitas media pembelajaran seperti internet atau lainnya mempunyai dua arah tujuan<sup>51</sup>, yakni: *pertama*: agar siswa memiliki kesadaran bahwa ada sumber informasi yang dapat membantu siswa melakukan kajian dan penemuan. *Kedua*: memberikan pengertian atas penggunaan alat sebagai sarana mencari informasi bukan dipahami sebagai ukuran peradaban apalagi kemajuan.

c) *Sharing*

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm: 12

<sup>50</sup> Sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Musa, *Ibid.* hlm: 12-13

<sup>51</sup> Sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Musa, *Ibid.* hlm: 12-13

*Sharing* dapat diartikan dengan berbagi pengalaman antar individu dalam memecahkan masalah. Hal ini dimungkinkan untuk menyadarkan bahwa setiap siswa tidak dapat hidup sendiri apalagi dalam konteks komunitasnya sehingga guru juga harus berperan aktif dalam memberi kesempatan untuk memfasilitasi *sharing* ini dalam bentuk dialog yang setara dengan tingkat kebutuhan pengertian dalam daya nalar siswa.<sup>52</sup>

#### 5) Evaluasi pembelajaran

Pendidikan yang berbasiskan komunitas memiliki pandangan bahwa yang paling memahami apa yang telah dikerjakan dari target-target yang ditetapkan adalah dirinya sendiri maka penilaian yang paling tepat adalah ketika siswa dengan kesadarannya mau dan mampu mengevaluasi dirinya (*self evaluation*). Dengan mengevaluasi diri maka akan timbul kesadaran apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk membangun kapasitas dirinya. Ketika siswa dievaluasi oleh orang di luar dirinya (guru, terlebih pemerintah sebagai entitas yang jauh di luar diri siswa) sering mengalami kekecewaan karena parameternya selalu menurut penilai.<sup>53</sup>

Bagi Paulo Freire<sup>54</sup>, semakin birokratis para pengevaluasi, bukan hanya dari sudut pandang administratif, namun juga dari sudut pandang intelektual, maka apa yang akan dilakukan pengevaluasi itu akan semakin sempit maknanya dan lebih mirip dengan inspektor, sebaliknya semakin terbuka dan kreatif, maka mereka akan semakin anti dogmatis dan evaluatif.

Ketika siswa mau dan mampu mengevaluasi diri sendiri sehingga timbul kesadaran atas potensi yang dimiliki, kelebihan dan kekurangan dirinya, maka sebenarnya ia telah menemukan eksistensi dirinya. Di sinilah dan saat itulah (penemuan jati diri) pendidikan benar-benar terwujud. Bagi penulis hakikat dari aktivitas pendidikan adalah upaya menemukan jati diri seseorang, sehingga selanjutnya terasa selaras dan serasi antara hakikat tujuan pendidikan dengan keharusan setiap manusia untuk dapat "mengenal" dirinya sendiri, dalam terminologi agama disebutkan bahwa dengan mengenal diri kita mengenal Tuhan.

---

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm: 12-13

<sup>53</sup> Sujono Samba, *op. cit.* hlm: 47-48

<sup>54</sup> Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Terjemahan oleh Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiartanto, 2002. Yogyakarta: ReaD bekerjasama dengan Pustaka Pelajar. Cet. III. Hlm: 58